BAB V

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2021).

Chidir Ali, *Badan Hukum* (Bandung: Alumni, 1999).

CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

Freddy Harris and Leny Helena, *Notaris Indonesia* (Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja, 2017).

Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013).

H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2* (Jakarta: Djambatan, 2007).

Mochammad Dja'is and RMJ Koosmargono, *Membaca Dan Mengerti HIR* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020).

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu : Konsep Teoritis, Kewenangan* Notaris*, Bentuk Dan Minuta Akta* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016).

Sjaifurrachman and Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban* Notaris *Dalam Pembuatan Akta* (Bandung, 2011).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986).

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013).

Sugiyono*, Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022).

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2019).

JURNAL

Alexander Prabu and Ika Novita Harahap, "Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law," Jurnal Lex Specialis Vol. 1, no. No. 2 (2021): 171–77.

Anak Agung Ayu Intan Puspadewi, "Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 14–25, https://doi.org/10.38 043/jah.v5i1.3383.

Anggreany Arief and Rizki Ramadani, "Omnibus Law Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 2 (2021): 106–20, https://doi.org/10.35673/ ajmpi. v6i2.1550.

Bayu Dwi Anggono, "OMNIBUS LAW SEBAGAI TEKNIK PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG: Peluang Adopsi dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia," *RechtsVinding* 9, no. 1 (2020): 17–37.

Cahyani Aisyah, "Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Perorangan," *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (2021): 41–58, https://doi.org/10. 33331/mhn.v51i1.140.

Christin Sasauw, "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris," Lex Privatum 3, no. 2 (2015): 98–109.

Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia," *Lex Jurnalica* Vol.12, no. No.3 (2015): p.248-258.

Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 73–92, https://doi.org/10.24 246/jrh.2014.v8.i1.p73-92.

Eka Purnamasari, Miftah Anshori, and Gunarto, "Alasan Pembatasan Dan Perubahan Ketentuan Terkait Modal Dalam Perseroan Terbatas," *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 203–10.

Farhad Lubbena and I Dewa Ayu Dwi Mayasari, "Kepastian Hukum Pendirian Perseroan Perseorangan Tanpa Akta Notariil Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja," *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 01 (2022): 133–45.

Komang Ayuk Septianingsih, I Nyoman Putu Budiartha, and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 336–40, https:// doi.org/10.22225/ah.2.3.2584.336-340.

Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, https://doi. org/10.14710/gk.2020. 7504.

Milatul Aslamiyah, "Pertanggungjawaban Pemegang Saham Dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Nalar Keadilan* 1, no. 1 (2021): 44058.

Mukhtar Leo Harahap, H.M.Yamin Lubis, and Mukidi, 'Analis Yuridis Pendirian Dan Pendaftaran Perseroan Perseorangan Menurut Undang-Undang Cipta Kerja dihubungkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021', *Jurnal*

Ilmiah Metada, 4 (2022). https://medium.com/@arifwi caksanaa/ pengertian-use-case-a7e576e1b6bf

Putri Triari Dwijayathi Desak Putu Dewi Kasih, A.A. Gede Duwira Hadi Santosa, I Made Marta Wijaya, "Perseroan Perorangan Pasca Uu Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal," *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022): 20–37, https://doi.org/https://doi.org/ 10.21776/ub. arenahukum.2022 .01501.2

Putu Devi Yustisia Utami and Kadek Agus Sudiarawan, "Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro Dan Kecil: Kedudukan Dan Tanggung Jawab Organ Perseroan," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 4 (2021): 769–81, https://doi.org/10.24843/ JMHU.202z1 .v10.i04.p08.

Putu Inten Andhita Dewi and I Wayan Novy Purwanto, "Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja," *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 3 (2021): 549–60, https://doi. org/10.24843/AC.2021.v06.i03.p7.

Shinta Pangesti, "Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Miro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemu Covid-19," *Jurnal Rechts Vinding* 10, no. April (2021): 117–31.

Siti Fauziah Dian Novita Sari, "Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas," *Lex Renaissance* 2, no. 3 (2018): 407–22.

Sylvia Putri and David Tan, 'Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas', *UNES Law Review*, 4.3 (2022), 317–31 <https: //doi.org/10.31933/unesrev. v4i3.239>.

Yuliana Duti Harahap, Budi Santoso, and Mujiono Hafidh Prasetyo, 'Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang

Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja', *Notarius,* 14.2 (2021), 725–38 <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43800>.

PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

INTERNET

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Pemerintah Terbitkan Perpu Cipta Kerja," Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022, https://setkab. go.id/ pemerintah-terbitkan-perppu-cipta-kerja/.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "SIARAN PERS No. HM.4.6/137 /SET.M.EKON.2.3/10/2020: RUU Cipta Kerja Disepakati, Perlindungan UMKM Dan Pekerja Jadi Prioritas," 2020, https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/545/ruu-cipta-kerja-disepakati-perlindungan-umkm-dan pekerja-jadi- prioritas.

Nano Tresna, "MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2021, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816.